

PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Miftahur Ridho

(Dosen Fakultas Ushuluddin LAIN Samarinda / miftahurridho@gmail.com)

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang ramah terhadap semua kelompok sosial, termasuk anak-anak dan remaja. Keramahan tersebut tercermin dalam pandangan Islam yang sarat dengan pesan-pesan pembelaan atas hak-hak anak serta celaan bagi kelompok-kelompok yang menelantarkan mereka. Dalam tulisan ini, hadist-hadist Nabi SAW yang berkenaan dengan kesejahteraan sosial bagi anak akan dilihat melalui kaca mata pelayanan sosial berbasis hak asasi manusia. Konsep ideal mengenai anak yang terkandung dalam hadist-hadist yang dianalisis dalam tulisan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan anak dan remaja pada posisi yang unik dalam struktur sosial. Dengan demikian, layanan sosial yang ditujukan bagi kelompok anak dan remaja harus mempertimbangan tahap-tahap perkembangan spiritual serta sesuai dengan konteks budaya yang berkembang dalam lingkungan sosial mereka.

Kata kunci:

Anak dan remaja, Islam, HAM, Keterlantaran, Layanan sosial.

Abstract:

The aim of this paper is to show that Islam is a children and youth friendly religion. This friendliness is reflected by the fact that Islamic perspective towards children and youth related social problem is loaded with ideas of advocating their rights and excoriating the perpetrators of abuse toward them. Thus, this paper deals with stories of the prophet Muhammad concerning social welfare of children and youth. Those stories will be analyzed according to the implementation of social services based on the promotion of human rights model. Ideal concept of children within the stories analyzed in this paper indicates that Islam positions children and youth in a unique place among groups of society. Therefore, provision of social services intended to increase the

wellbeing of children and youth must consider their spiritual development as well as cultural aspects of their social setting.

Key Words:

Children and youth, Islam, Human rights, Neglect, Social service.

Pengantar

Masyarakat mengalami perubahan sejalan dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh individu-individu yang menyusunnya. Perubahan-perubahan tersebut dapat bernilai positif maupun negatif. Kompetisi antar anggota masyarakat telah lama dipercaya sebagai bahan bakar utama berbagai perubahan yang terjadi pada sebuah masyarakat. Terdapat berbagai sudut pandang dalam melihat kompetisi, namun yang pasti, kompetisi tersebut tentulah berkaitan dengan penguasaan sumber-sumber daya yang tersedia. Pada masyarakat yang demokratis, sumber daya yang tersedia biasanya dikelola berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota masyarakat, baik kesepakatan tertulis maupun tidak. Sementara itu, pada masyarakat yang tidak menghargai demokrasi, pengelolaan sumber daya umumnya ditentukan oleh segelintir pihak saja.

Mekanisme penguasaan sumber daya yang jumlahnya selalu dianggap terbatas itu sendiri merupakan sumber utama keteraturan sekaligus konflik di tengah masyarakat. Meski keteraturan dalam masyarakat tidak ada hubungannya dengan pembagian sumber daya secara merata, tetap saja, ketimpangan selalu memunculkan konflik. Ketimpangan selalu hadir sebagai dampak dari penguasaan sumber daya yang tidak didasari pada nilai-nilai keadilan sosial. Meski begitu, masyarakat yang telah terbiasa hidup dalam pola penguasaan sumber daya yang timpang, lambat laun, mulai tidak menyadari ketimpangan tersebut serta menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan pola-pola pembagian sumber daya yang ada.

Sejarah gerakan sosial di berbagai tempat pada berbagai rentang waktu membuktikan bahwa ketimpangan dapat berujung pada reaksi-reaksi pemberontakan yang berakibat fatal. Kesadaran masyarakat tidak selamanya dapat dibungkam. Hal ini terutama karena selalu saja muncul orang-orang yang memantik kesadaran masyarakatnya dengan berbagai cara yang mungkin dilakukan. Orang-orang ini biasanya dikenal dengan berbagai sebutan, seperti: pembaharu, inovator, agen perubahan, dan aktivis sosial. Bahkan tidak jarang mereka diidentikkan dengan tokoh-tokoh terhormat dalam ajaran agama, seperti

pewaris nabi dalam Islam, titisan Gautama dalam ajaran Budha atau titisan dewa dalam Hindu.

Dalam persaingan memperebutkan sumber-sumber daya yang tersedia, terdapat kelompok masyarakat yang keluar sebagai pemenang dan memegang kendali atas sebagian besar sumber daya yang tersedia. Sementara itu, kelompok masyarakat yang gagal dalam persaingan cenderung semakin tersisih dari lingkup kompetisi dan terasing dari sumber-sumber daya yang tersedia. Kelompok yang terakhir disebut umumnya akan mempertentangkan diri mereka dengan kelompok-kelompok pemegang kendali atas sumber daya. Kelompok ini biasanya akan membentuk kebudayaan mereka sendiri, yang khas dan berbeda dengan kebudayaan masyarakat pada umumnya. Hal ini terutama karena mereka dituntut untuk bertahan dengan sumber daya yang lebih sedikit dari umumnya orang-orang dalam masyarakat mereka.

Bagaimanapun juga, perbedaan kelas ini tidaklah bersifat permanen meski juga tidak mudah untuk melakukan perpindahan vertikal dari satu kelas ke kelas yang lebih tinggi. Untuk melakukan hal tersebut, terkadang diperlukan bantuan-bantuan dari pihak lain di luar komunitas tersebut. Dinamika pertolongan untuk memampukan kelompok masyarakat yang tidak dapat berkompetisi dalam perebutan sumber daya tersebut merupakan pengertian paling dasar atas wacana pengembangan masyarakat. Mengembangkan masyarakat berarti menempatkan kelompok tidak berdaya sebagai aktor aktif yang dituntut untuk berjuang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kelak saat kelompok tersebut sudah berdaya, mereka akan kembali memasuki panggung kompetisi dengan perlengkapan dan persiapan yang cukup sehingga mereka tidak dengan mudah tersingkir begitu saja.

Korban yang paling menderita akibat terjadinya eksklusi sosial sebagai eksese lanjutan dari persaingan memperebutkan sumber daya adalah anak-anak. Hal ini karena, secara sosial, anak adalah bagian dari masyarakat yang sedang dalam proses menjadi anggota. Seorang anak perlu memahami perilaku-perilaku orang dewasa di sekitar mereka dengan sebaik mungkin agar dapat membangun identitas yang sehat di kemudian hari.

Pada lingkungan di mana masing-masing anggota masyarakat memerankan fungsi mereka secara ideal, anak akan belajar dengan lebih cepat mengenai fungsi dan peran mereka. Pada lingkungan di mana penyimpangan-penyimpangan sosial merupakan sesuatu yang jamak terjadi, seorang anak juga cenderung akan menjadi bagian dari permasalahan sosial. Sederhananya, dalam lingkungan keluarga yang termasuk kelompok marginal di tengah masyarakat,

anak-anak akan menginternalisasi norma-norma serta perilaku-perilaku yang menunjang tumbuh kembangnya persistensi masalah-masalah sosial.

Secara ideal, posisi anak adalah titipan tuhan bagi para orang tua. Dengan hadirnya anak di tengah keluarga, seyogyanya hubungan interpersonal yang telah terjalin akan menguat sejalan dengan terciptanya tujuan bersama yang lebih luhur, yaitu memberikan yang terbaik bagi anak. Sebagai titipan dari yang maha kuasa, setiap orang tua tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan menghambat pemenuhan potensi diri dari anak-anak mereka. Setiap orang dengan anak dituntut untuk dapat menyediakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan fisik, mental dan sosial dari anak-anak mereka.

Anak umumnya terdiskriminasi oleh struktur sosial yang didominasi oleh orang dewasa. Ketika seorang anak terdiskriminasi, keberpihakan masyarakat umum biasanya tidak dalam posisi memberdayakan mereka. Hal ini adalah prevalensi yang lumrah ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah-wilayah yang sedang berkembang. Diskriminasi sosial terhadap anak lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Hal ini terutama karena masyarakat umumnya memandang bahwa anak sebagai individu yang belum matang sehingga belum dapat bertanggung jawab atas pilihan-pilihan hidup yang mereka ambil.

Banyak permasalahan sosial yang muncul ketika seorang anak beranjak menuju kedewasaan. Permasalahan-permasalahan tersebut berkenaan dengan aspek internal kejiwaan anak itu sendiri maupun aspek eksternal berupa lingkungan sosial di mana anak tersebut berada. Seorang anak yang sedang dalam proses menuju kedewasaan umumnya akan lebih sering melakukan eksperimen sosial berdasarkan pengetahuan terbatas yang mereka miliki. Eksperimen-eksperimen tersebut kerap dilakukan tanpa mengidentifikasi secara cermat dampak-dampak buruk yang mungkin terjadi karenanya.

Anak memiliki kebutuhan yang beragam, tergantung posisi mereka dalam kontinum fase perkembangan. Memahami kebutuhan anak tentu bukan perkara yang mudah. Kebutuhan anak merentang dari kebutuhan atas pembelajaran sosial yang baik hingga pada hubungan sosial yang harmonis dan mendukung terhadap proses pematangan dimensi psikososial mereka. Pemenuhan kebutuhan spiritual dipercaya dapat meningkatkan kemampuan coping anak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang mereka hadapi, termasuk kemiskinan dan keterlantaran. Selain itu, pemenuhan spiritual anak juga merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dengan pemenuhan aspek-aspek kehidupan lainnya. Segala jenis kebutuhan tersebut tidak bersifat hirarkikal melainkan harus dipenuhi secara simultan. Untuk proses tumbuh

kembang yang sehat, pemenuhan satu kebutuhan tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan pemenuhan jenis-jenis kebutuhan lainnya.

Konsep Anak Jalanan dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama universal yang senantiasa sesuai dengan segala konteks ruang dan waktu. Hal tersebut adalah salah satu konsekuensi dari Islam sebagai agama samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT. Setelah Nabi Muhammad wafat, komunikasi vertikal yang ter-otorisasi¹ antara manusia dengan tuhan menjadi tidak lagi memungkinkan. Islam, karenanya, lebih banyak berisi nilai-nilai universal yang mengatur hubungan antar manusia ketimbang perangkat-perangkat doktrin yang mesti dipatuhi oleh para pemeluknya. Dengan demikian, interpretasi atas teks-teks keagamaan berupa al-Qur'an dan Al-Hadist yang telah terbukukan dengan baik kerap menjadi sumber perdebatan mengenai cara-cara memaknai dan menjalankan ajaran agama (Islam) itu sendiri.

Jika dicermati lebih seksama, Islam sendiri pada dasarnya merupakan seperangkat ajaran yang tujuan utamanya adalah membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan oleh sesama manusia –sebagai dampak negative dari keragaman dalam menginterpretasi teks agama. Hal ini tampak jelas melalui ajaran tauhid, yaitu posisi teologis Islam sebagai sebuah agama. Islam menyebut bahwa Tuhanlah satu-satunya entitas yang harus dipatuhi secara mutlak. Selain itu, manusia dituntut untuk senantiasa berfikir dan berdialog demi membangun perangkat nilai dan norma yang nantinya akan dipatuhi oleh semua orang. Perangkat nilai dan norma inipun tidak boleh bertentangan dengan inti-inti ajaran Islam.

Kaitannya dengan anak jalanan adalah bahwa fenomena anak jalanan merupakan masalah sosial yang berkaitan erat dengan pola relasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Terma anak jalanan digunakan oleh para ilmunan dan praktisi untuk menjelaskan hubungan-hubungan sosial tertentu yang melibatkan anak. Interaksi antara anak dan lingkungan sosial dengan pola-pola tertentu yang dipandang tidak sesuai dengan kaidah umum yang universal serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak asasi manusia merupakan kerangka dasar yang lazim digunakan untuk mengkonseptualisasi konstruk teoritis mengenai anak jalanan.

Bagaimanapun juga, terma anak jalanan istilah yang sulit didefinisikan. Istilah anak jalanan terdiri dari dua kata, yaitu anak dan jalanan. Beragamnya

¹ Setelah wafatnya Nabi Muhammad, proses pewahyuan ayat-ayat Allah menjadi terhenti secara otomatis hingga akhir zaman.

interpretasi atas keedua kata kunci yang membangun istilah anak jalanan diyakini sebagai salah satu pemantik utama ambiguitas dalam mendefinisikan istilah tersebut. Meski demikian, hal tersebut tidak menghalangi berbagai organisasi tingkat dunia untuk membangun kesamaan makna atasnya. Sebagai contoh, sebut saja UNICEF yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah delapan belas tahun. Definisi ini disepakati oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menyebutkan hal senada mengenai konsep anak.

Di samping itu, istilah jalanan juga memiliki berbagai pemaknaan yang membuatnya sulit untuk diterapkan secara lintas budaya. Bagi sebagian pihak, jalanan dapat berkonotasi negative. Hal ini terutama karena jalanan kerap diidentikkan dengan tempat-tempat terjadinya berbagai hal tidak diinginkan seperti kecelakaan, pencopetan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Bagi pihak lainnya, jalanan tidak selamanya berkonotasi negative melainkan dapat juga dimaknai sebagai tempat bersosialisasi, tempat bermain, tempat membantu orang tua mencari nafkah dan lain sebagainya.

Fenomena anak jalanan lazimnya dilihat melalui dua sudut pandang utama, yaitu pandangan legal dan humanitarian. Pandangan legal berfokus pada perlakuan hukum yang berbeda kepada anak-anak yang terlibat dalam tindakan-tindakan melanggar hukum. Mengambil posisi yang tidak sepenuhnya berseberangan, Pandangan humanistic yang umumnya digunakan oleh para pegiat hak-hak anak internasional berupaya untuk menunjukkan bahwa jalanan bukanlah tempat yang baik bagi anak untuk mengembangkan identitas sosial serta potensi diri yang mereka miliki, dan karena itu selalu memandang jalanan melalui kacamata negative.

Meski demikian, tren yang berkembang dewasa ini berkenaan dengan mengatasi masalah-masalah sosial terkait anak jalanan dapat dilihat melalui fenomena meluasnya penggunaan istilah kesejahteraan anak berbasis masyarakat, menggantikan istilah menyelamatkan anak dari bahaya-bahaya yang terdapat di jalanan. Dalam pandangan yang disebut terakhir, anak tidak lagi ditempatkan sebagai objek yang tidak memiliki peran aktif dalam menentukan jalannya intervensi sosial, alih-alih, anak ditempatkan sebagai bagian paling penting dalam menyusun model-model yang tepat untuk memberdayakan mereka.²

² Alfred J.Khan, "From Child Saving to Child Development?" dalam "From Child Welfare to Child Well-Being: An International Perspective on Knowledge in The Service of Policy Making", Editor: Sheila B. Kamerman, Shelley Phipps dan Asher Ben-Arieh, (Tel Aviv: Springer, 2010), hlm. 6-7.

Meski dasar pemikiran untuk menjelaskan istilah anak jalanan itu sendiri sangatlah luas dan tidak spesifik, membuat batasan atas istilah tersebut adalah hal urgent yang harus segera dilakukan. Salah satu pandangan yang dapat mengakomodir urgensi atas batasan tersebut adalah perspektif Islam. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai penanganan anak jalanan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Islam yang unik mengenai peran dan kewajiban anak sebagai konsekuensi dari batasan Islam mengenai terma anak itu sendiri.

Dalam Islam, anak merujuk pada rentang usia di mana seseorang belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, tentu dalam kaitannya dengan system norma yang terkandung dalam ajaran Islam. Seseorang yang telah mampu membedakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam dapat dianggap sebagai seorang yang telah lepas dari status anak-anak. Keadaan demikian sebenarnya mengacu pada tanggung jawab personal yang harus diemban seseorang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya secara sadar. Anak-anak, dalam diskursus seperti ini, adalah mereka yang belum sepenuhnya dikenai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka sehubungan dengan perintah dan larangan dalam agama (Islam).

Kematangan seksual adalah dasar paling penting yang digunakan Islam dalam mendefinisikan istilah anak dan orang dewasa. Sederhananya, seorang laki-laki yang telah matang secara seksual (ukurannya: telah mendapatkan mimpi basah hingga mengeluarkan sperma) dapat dianggap sebagai 'bukan' anak-anak. Sementara itu, seorang perempuan yang telah mendapatkan menstruasi mereka juga tidak lagi dikelompokkan ke dalam golongan anak-anak.

Meski terma 'jalanan' (sewaz) tampaknya tidak begitu populer dalam khazanah kajian Islam, jalanan umumnya didefinisikan sebagai tempat di mana anak-anak seharusnya tidak berada dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sana. Jalanan dalam padangan seperti ini lebih mengacu pada keadaan di mana orang tua atau wali tidak memiliki peran yang memadai dalam membantu anak yang berada pada perwaliannya untuk berkembang menjadi seorang manusia yang baik sekaligus seorang muslim yang taat.

Hadist-Hadist Mengenai Anak Jalanan

Perbedaan konteks ruang dan waktu antara zaman Nabi Saw dengan zaman modern sekarang ini berimplikasi pada perbedaan cara dan strategi yang dikembangkan Nabi dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat. Pada era Nabi, interkoneksi antara satu fenomena sosial dengan berbagai fenomena sosial lainnya masih pada derajad yang dapat amati

secara sederhana. Ditambah dengan bimbingan langsung dari Allah, Nabi tentu saja dapat mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul pada masanya secara efektif dan efisien.

Tantangan terbesar sebenarnya dihadapi oleh umat Nabi yang hidup jauh setelah masa kenabian, di mana permasalahan sosial mengalami transformasi yang sedemikian canggih sehingga keterkaitan antara berbagai fenomena sosial tidak lagi dapat diamati secara sederhana. Apa yang terjadi pada belahan dunia yang satu pada dasarnya mempengaruhi dinamika fenomena sosial pada belahan dunia lainnya. Berkat invensi dan inovasi pada bidang teknologi komunikasi, keterkaitan antara satu fenomena sosial dengan fenomena sosial lainnya bisa dikatakan telah memasuki fase baru yang tidak pernah ditemukan pada masa-masa sebelumnya.

Demikian halnya dengan fenomena sosial anak jalanan. Pada masa Nabi, fenomena banyaknya anak-anak terlantar masih dapat dilihat sebagai akibat dari banyaknya para orang tua yang meninggal dalam berbagai peperangan –yang ketika itu lazim terjadi. Pada masa sekarang, fenomena anak jalanan tidak lagi dapat dipandang dengan cara yang demikian. Anak jalanan pada era modern sekarang ini lebih merupakan akumulasi dari beragam permasalahan sosial lain yang merentang dari masalah keluarga hingga masalah kebijakan internasional.³

Perbedaan antara realitas sosial yang dihadapi Nabi dengan realitas yang dihadapi pekerja sosial pada masa modern⁴ berdampak pada perbedaan metode

³ Sebagai gambaran makro, ambil contoh kebijakan ekonomi yang diambil negara-negara eropa sehubungan dengan proteksi pasar. Negara-negara eropa, terutama karena khawatir akan krisis ekonomi, semakin menyadari bahwa perekonomian pasar yang selama ini dianut cenderung mengarah pada ketidakstabilan sehingga sewaktu-waktu dapat memantik terjadinya krisis ekonomi yang mengerikan. Untuk menciptakan kestabilan harga, negara-negara eropa mulai membatasi impor barang jadi maupun setengah jadi sehingga negara-negara mitra mereka – terutama Asia- menjadi kewalahan. Bagi negara-negara yang disebutkan belakangan, penurunan volume ekspor tersebut adalah sebuah berita buruk bagi perekonomian yang memang pada dasarnya masih rapuh. Sederhananya, kebijakan proteksi pasar yang diambil Eropa guna melindungi perekonomian mereka menyebabkan terjadinya banyak PHK di negara-negara yang disebut belakangan. Melalui kaca mata yang lebih mikro, PHK berarti menurunnya kemampuan rumah tangga-rumah tangga kelas pekerja dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang memadai bagi anak-anak. Akibatnya, anak-anak menjadi rentan dan sewaktu-waktu dapat tergelincir menjadi anak jalanan. Lihat, M. C. Hokenstad dan James Midgley (Eds), *Issues in International Social Work: Global Challenges for a New Century*, (USA, NASW Press: 1997)

⁴ Beberapa ilmuwan menyebut bahwa Nabi adalah seorang pekerja social. Menurut kalangan ini, pekerjaan utama nabi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pekerjaan utama para pekerja sosial, terutama pekerja sosial Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam rentang usia beliau

dan strategi yang dikembangkan oleh kedua pegiat sosial pada dua rentang waktu yang berbeda ini, termasuk metode-metode serta strategi pemberdayaan guna meningkatkan kemandirian masyarakat. Yang cenderung tidak berubah adalah semangat yang melandasi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat tersebut.

Semangat yang melandasi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Nabi berkenaan dengan masalah anak –terutama masalah anak jalanan– salah satunya dapat dilihat pada hadist di bawah ini.

Muhammad bin Wazir al-Wasithi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yusuf al-Azraq menceritakan kepada kami dari sufyan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar ia berkata, "aku pernah menawarkan diri untuk ikut dalam sebuah pasukan –saat itu aku baru berusia empat belas tahun, namun beliau tidak menerimaku. Kemudian pada tahun berikutnya aku menawarkan diri kembali untuk ikut dalam sebuah pasukan, saat itu aku berusia lima belas tahun, dan beliau pun mau menerimaku.

Nafi' berkata "aku telah menyampaikan peristiwa ini kepada Umar bin Abdul Aziz, maka ia berkata, 'inilah batas antara anak-anak dan dewasa. Setelah itu, dia mewajibkan perang bagi orang yang sudah berusia lima belas tahun.'"⁵

Ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari hadist di atas, terutama sekali pelajaran mengenai hakikat pemberdayaan yang peka terhadap tahap perkembangan seseorang. Kentalnya nuansa pemberdayaan dalam Hadist di atas tampak, misalnya, ketika Nabi melarang seorang sahabat yang belum genap berusia lima belas tahun untuk mengikuti Nabi melakukan jihad berupa perang terbuka. Tindakan melarang yang dilakukan Nabi tentu saja memiliki

sebenarnya dapat dilihat sebagai masa pembentukan dasar-dasar etis dan teoritis pekerjaan sosial Islam. Secara makro Nabi jelas-jelas menunjukkan keberpihakan terhadap kaum marjinal di tengah masyarakat. Nabi juga dengan tekun menggerakkan masyarakat marjinal tersebut melalui mekanisme-mekanisme *community organizer* yang sangat canggih untuk ukuran zaman itu. Tidak jarang Nabi juga mengambil resiko-resiko yang sangat besar demi keberhasilan advokasi sosial yang digagasnya. Sebagai contoh sebut saja berbagai bentuk perang terbuka yang diikuti Nabi pada masa-masa awal gerakan sosio-spiritualnya. Pada tataran yang lebih mikro, cerita-cerita (Hadist) mengenai kehidupan Nabi menunjukkan bahwa Nabi juga merupakan sosok pegiat sosial yang tidak segan-segan untuk membaur dengan umatnya dari berbagai lapisan dan kalangan. Dalam kaca mata pekerjaan sosial, tentu Nabi adalah pekerja sosial paling ideal yang pernah ada di muka bumi ini.

⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, terj. Fahrurrazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 117.

alasan yang jelas dan disertai pertimbangan yang matang. Nabi sepertinya ingin memberikan pelajaran kepada pekerja sosial yang hidup belakangan bahwa *assessment* yang komprehensif dan memadai terhadap kelayan adalah perkara mutlak yang mesti dilakukan sebelum menentukan model intervensi yang tepat sesuai dengan tingkat kematangan biopsikososial kelayan.

Meski pemberdayaan pada esensinya berarti memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan hal-hal yang dapat memaksimalkan potensi diri mereka, seorang pekerja sosial ataupun pemangku kepentingan sosial lainnya harus menilik dengan bijaksana konteks ruang dan waktu dari distribusi kewenangan tersebut. Memberik kewenangan tanpa pertimbangan yang memadai sama halnya dengan memberikan senjata kepada mereka yang belum mampu menggunakannya. Alih-alih memanfaatkan kewenangan tersebut dengan optimal, kewenangan tersebut, yang diberikan kepada mereka yang belum mampu mengendalikannya, pada akhirnya cenderung menjadi sumber masalah di tengah masyarakat.

Tindakan Nabi untuk membatasi kewenangan seorang sahabatnya pada Hadist di atas adalah salah satu contoh bagaimana Nabi mempertimbangkan dengan seksama masalah ini. Tangguh waktu satu tahun yang diberikan Nabi sebelum sahabat tersebut dapat bergabung dengan pasukan kaum muslimin tentu saja dapat dianggap sebagai rentang waktu yang diberikan Nabi kepada sahabat tersebut untuk menjadi lebih matang secara psikologis dan sosiologis. Proses pematangan tersebut tentu saja ditopang dengan kondisi pendidikan (baca: pembelajaran) sosial yang ketika itu terintegrasi secara sempurna dalam model-model dakwah islamiyah.⁶

⁶ Di Indonesia sendiri, kaburnya makna pemberdayaan dalam khazanah keilmuan ditengarai disebabkan oleh, salah satunya, ketidakjelasan antara pemberdayaan sebagai distribusi wewenang (kekuasaan) dengan upaya-upaya meningkatkan kapasitas individual masyarakat. Pada negara-negara barat (asal dari istilah *community empowerment*) yang mayoritas penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai, distribusi kewenangan (kekuasaan) adalah isu utama yang dihadapi oleh pada pegiat sosial. Berbeda halnya dengan masyarakat barat yang berpendidikan relative lebih tinggi, masyarakat Indonesia (serta negara-negara berkembang lainnya) cenderung ditandai dengan tingkat pendidikan penduduk yang secara umum masih rendah. Oleh karena itu, isu pemberdayaan dalam konteks yang disebut belakangan tidak hanya berputar pada masalah distribusi kekuasaan melainkan juga pada isu peningkatan skill dan keterampilan individual masyarakat sehingga dapat mengendalikan kekuasaan yang nantinya akan didistribusikan kepada mereka. Pendidikan dan pembelajaran sosial, dengan demikian, adalah tema central dalam setiap model pemberdayaan pada hampir semua tempat di dunia. Lihat, Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta, Gava Media: 2004).

Pemberdayaan Anak Jalanan dalam Pandangan Islam

Istilah pemberdayaan masyarakat mengandung berbagai arti yang berbeda-beda. Istilah ini mengemuka terutama sebagai sebuah proses sekaligus cara pandang dalam melihat realitas, yang dianut oleh para pekerja sosial (dan profesional di bidang lain) dalam kaitannya dengan usaha mengembalikan keberdayaan individu-individu dalam masyarakat sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menentukan arah kehidupan mereka secara mandiri.⁷

Pengembangan masyarakat erat kaitannya dengan kekuasaan. Individu-individu dalam masyarakat akan dianggap berdaya jika mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Kekuasaan itu sendiri erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang kurang berdaya, dengan begitu, identik dengan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai agar dapat terlibat dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial di lingkungan mereka.

Menurut Jim Ife, istilah komunitas yang kerap muncul dalam terma pengembangan masyarakat juga mengandung arti yang berbeda-beda. Bagi Ife, istilah komunitas bersifat subjektif dan cenderung diartikan secara unik oleh orang yang menggunakannya. Meski begitu, istilah komunitas umumnya memberikan kesan positif bagi orang yang menggunakan istilah tersebut. Istilah komunitas dipercaya memberikan semacam gambaran mengenai hubungan-hubungan interpersonal yang berkualitas di antara para penduduk di daerah pedesaan.⁸ Gambaran tersebut tentu saja tidak selamanya benar, penduduk desa, meski dikenal ramah dan bersahabat, juga memiliki sisi-sisi yang garang dan kadang tidak dapat diprediksikan.

Konsep pengembangan masyarakat dapat dilihat melalui dua sifat utamanya, yaitu pengembangan masyarakat yang bersifat top-down dan pengembangan masyarakat yang bersifat bottom-up. Pada bentuk pertama, pengembangan masyarakat diarahkan oleh para ahli yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam hal menentukan keputusan-keputusan bagi sebuah masyarakat.⁹ Dalam bentuknya yang ekstrim, pengembangan masyarakat seperti ini pada dasarnya adalah bentuk lain dari penjajahan. Hal ini karena para ahli tersebut memaksakan pendapat mereka kepada masyarakat tanpa mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat yang dikembangkan.

⁷ Mary Nash, Robyn Munford dan Kieran O'Donoghue, *Social Work Theories In Action*, (London: Jessica Kingsley Publisher, 2005), hlm. 98.

⁸ Jim Ife, *Human Rights From Below: Achieving Rights Through Community Development*, (New York: Cambridge University Press, 2009), hlm. 0-11.

⁹ Jim Ife, *Human Rights From Below*, hlm. 17.

Bentuk pengembangan masyarakat yang disebut belakangan, adalah lawan dari bentuk yang pertama. Pengembangan masyarakat dengan bentuk *bottom-up* menempatkan masyarakat yang akan diberdayakan sebagai pelaku aktif dalam proses pengembangan. Bentuk ini mengakui bahwa setiap masyarakat memiliki pengetahuan yang biasanya diperoleh melalui pengalaman. Pengetahuan ini umumnya berwujud norma dan tradisi yang dikenali oleh setiap anggota masyarakat dan melandasi perilaku dari masyarakat tersebut. Tipe pengembangan masyarakat yang bersifat *bottom-up* menyadari bahwa pengetahuan tersebut potensial untuk dijadikan modal utama bagi proses pengembangan masyarakat.

Bagaimanapun juga, program-program pengembangan masyarakat umumnya dikembangkan berdasarkan dua pendekatan utama tadi. Jarang sekali terdapat program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada satu pendekatan saja. Akan tetapi dalam praktiknya, penerapan dari program-program pengembangan masyarakat cenderung untuk mengabaikan pendekatan *bottom-up* oleh karena penerapannya yang bersifat rumit dan terkadang kurang sinergis dengan tuntutan eksternal. Idealnya, pengetahuan masyarakat tersebut harus dapat menghasilkan barang atau jasa yang berguna tidak hanya bagi anggota komunitas tersebut, melainkan juga berguna dalam lingkup yang lebih luas. Hal ini merupakan salah satu factor penting yang menjamin sebuah upaya pengembangan masyarakat dapat terlaksana secara berlanjut dan berkesinambungan.

Pemberdayaan masyarakat setidaknya harus memiliki dimensi universal yang dapat diterapkan pada setiap kelompok sosial, termasuk pemberdayaan bagi kelompok sosial anak jalanan. Memberdayakan anak jalanan dapat dianggap sebagai proses menumbuhkan pilihan-pilihan yang lebih beragam bagi anak jalanan sehingga jalanan tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan hidup yang dapat diambil. Dalam konteks ini, hakikat pemberdayaan dengan sendirinya harus dilihat sebagai sebuah proses *enabling* (meningkatkan skill dan pengetahuan) dan *authorizing* (memberikan kekuasaan bagi anak-anak jalanan untuk mengaktualisasikan potensi diri mereka secara bebas dan bertanggung jawab) bagi anak jalanan.

Fenomena anak jalanan yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bencana sosial nasional yang hingga saat ini penanganannya masih belum tuntas. Tidak hanya itu, penanganan masalah-masalah sosial terkait keberadaan anak jalanan masih belum menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Alih-alih menempatkan anak jalanan sebagai korban dari absennya layanan-layanan sosial, anak jalanan cenderung dipandang secara terlampau

sederhana sebagai bagian kecil dari masalah kenakalan remaja secara umum. Padahal, dinamika kemunculan masalah-masalah sosial terkait anak jalanan erat kaitannya dengan kehadiran masalah-masalah sosial lainnya di tengah masyarakat. Penanganan masalah sosial terkait anak jalanan, karenanya, belum mampu menunjukkan gelagat yang menggembirakan.

Keberadaan anak jalanan menunjukkan keteledoran para pemangku kebijakan, terutama kebijakan sosial, dalam mengakomodir sumber daya-sumber daya sosial yang tersedia guna meningkatkan derajat kohesifitas sosial pada level keluarga. Kelekatannya antara anggota keluarga yang kian merenggang merupakan salah satu alasan penting yang dapat menjelaskan terjadinya fenomena anak jalanan di tengah masyarakat.

Seorang anak memiliki seperangkat hak asasi yang mesti dipenuhi oleh orang-orang dewasa yang bertanggung jawab (*responsible adult*) terhadap mereka. Kegagalan orang dewasa dalam memenuhi fungsinya berdampak bagi kualitas pemenuhan hak asasi bagi anak-anak yang berada di bawah perwalian mereka. Dalam konteks seperti ini, peran negara dalam menginisiasi dan menerapkan perundang-undangan yang mengatur masalah perwalian sangatlah penting. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menciptakan lingkungan sosial yang layak bagi proses tumbuh dan berkembang anak, lebih jauh, negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap konstituennya mendapatkan jatah kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Pemberdayaan anak jalanan harus dimulai dengan memberdayakan keluarga mereka di rumah. Anak jalanan hadir di tengah jalan bukan karena tanpa sebab, melainkan setelah melalui dinamika panjang yang melibatkan pilihan-pilihan sulit yang harus mereka ambil. Solusi segera memang tidak dapat dirumuskan dengan tergesa-gesa. Perlu ada kajian mendalam mengenai mode-mode transformasi keluarga Indonesia sebelum memutuskan bagaimana tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang diduga berkelindan dengan problem keluarga.

Hussein, misalnya, menyebut bahwa mayoritas anak jalanan di Mesir berangkat dari masalah-masalah yang mereka hadapi dalam *setting* keluarga. Menurut Hussein, klasifikasi paling relevan dalam menjelaskan kehidupan sosial anak jalanan adalah dengan membagi mereka berdasarkan lama waktu yang mereka habiskan di jalan. Tahap-tahap menuju anak jalanan berdasarkan pengelompokan Hussein adalah fase tahap awal melepaskan diri dari hubungan dengan keluarga (secara fisik), tahap transisi menuju kehidupan purna waktu di jalanan (fase ini ditandai kebingungan peran dan ambiguitas lainnya). Pada tahap ini seorang anak tarik menarik antara jalanan dan setting keluarga memasuki

tahap yang lebih matang, lalu tahap akhir, yaitu tahap tahap tinggal di jalan setelah memiliki kepercayaan diri bahwa ia dapat hidup di jalan dan terlepas dari hubungan dengan keluarganya.¹⁰

Pemberdayaan bagi anak jalanan karenanya mesti berjalan beriringan dengan penyediaan pendidikan yang memadai bagi mereka. Jika pendidikan formal tidak begitu memungkinkan, maka pendidikan nonformal yang berfokus pada pemberian keterampilan hidup dapat dijadikan sebagai alternative bagi anak jalanan. Pada akhirnya, ketika seorang anak jalanan telah memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalani hidup yang layak di luar setting jalanan, tentu ia akan memilih untuk tidak menjalani kehidupan di jalanan.

Kesimpulan

Jika mencegah lebih baik daripada mengobati, maka memutus mata rantai yang dilalui anak jalanan adalah tugas penting yang saat ini dibebankan pada pundak para pekerja sosial dan professional lain yang bergelut dengan masalah anak jalanan. Mengatasi masalah-masalah sosial terkait anak jalanan tanpa mempertimbangkan sebab-sebab yang mendorong mereka memilih jalanan adalah tindakan yang kurang efisien untuk dilakukan, terutama jika mengingat tingkat kesanggupan pemerintah dalam menyediakan sumber daya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dalam proses memutus mata rantai tersebut, nilai-nilai islam sebagaimana yang dapat dilihat melalui hadist-hadist Nabi dapat dijadikan pedoman berharga bagi para pekerja sosial kontemporer. Arti penting hadist-hadist tersebut pada dasarnya berkenaan dengan semangat pemberdayaan sosial yang menjadi bahan bakarnya. Untuk konteks Indonesia dengan mayoritas penduduk mengaku beragama Islam, intervensi-intervensi sosial bernafaskan nilai-nilai Islam secara tidak langsung bisa dianggap telah mendapatkan justifikasinya.

Bagaimanapun juga, model pemberdayaan anak jalanan sepenuhnya ditentukan oleh visi seperti apa yang dikembangkan oleh seorang pekerja sosial itu sendiri. Pekerja sosial, terutama pekerja sosial Islam, dituntut untuk memiliki visi yang jauh ke depan, persis seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dengan demikian ketika menghadapi masalah-masalah sosial yang canggih, pekerja sosial Islam tidak serta merta kelimpungan oleh karena telah dibekali dengan

¹⁰ Nashaat Hussein, “*Street Children in Egypt: Group Dynamics and Subcultural Constituents*”, Cairo Paper In Social Science, Vol. 26, No. 2, Summer 2003, hlm. 12.

pengetahuan yang mumpuni mengenai semangat universal yang ada di balik setiap upaya pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta, Gava Media: 2004
- Jim Ife, *Human Rights From Below: Achieving Rights Through Community Development*, USA: Cambridge University Press, 2009
- Mary Nash, Robyn Munford dan Kieran O'Donoghue, *Social Work Theories In Action*, London: Jessica Kingsley Publisher, 2005
- M. C. Hokenstad dan James Midgley (Eds), *Issues in International Social Work: Global Challenges for a New Century*, USA, NASW Press: 1997
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, terj. Fahrurrazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Nashaat Hussein, *Street Children in Egypt: Group Dynamics and Subcultural Constituents*, Cairo Paper In Social Science, Vol. 26, No. 2, Summer 2003
- Sheila B. Kamerman, Shelley Phipps dan Asher Ben-Arieh (Eds), *From Child Welfare to Child Well-Being: an International Perspective on Knowledge in the Service of Policy Making*, Tel Aviv: Springer, 2010

Miftabur Ridho